



Perception and Participation of Handline Tuna Fishers in the BPJS Employment Program Membership on Ambon Island

(Persepsi dan Partisipasi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan di Pulau Ambon)

Wahyudi La Mani ^{1,2✉}, Yoisy Lopolalan ³ dan Hellen Nanlohy ³

¹ Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

² Penyuluh Perikanan Ahli Muda BPPP Ambon

³ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.


Email: yudilamani@gmail.com

Article Info:

Received: 28 April 2026

Accepted: 7 Mei 2026

Online: 8 Mei 2026

 Article type:

<input type="checkbox"/>	Review Article
<input type="checkbox"/>	Common Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

 Keyword:

Handline Tuna; Fishers' Perception; Participation; BPJS Employment; Social Protection.

Corresponding Author:

Wahyudi La Mani
Universitas Pattimura
Ambon, Indonesia

Email:
yudilamani@gmail.com

Abstract

Handline tuna fishers, as part of the small-scale fisheries workforce, face high occupational risks; however, their participation in employment social security programs remains relatively low. This study aims to: (1) analyze fishers' perceptions of the BPJS Employment program; (2) examine the level of fishers' participation in program membership; and (3) formulate strategies to improve both perception and participation. The study was conducted from July to September 2025 in three coastal areas of Ambon Island, namely Seilale (urban area with relatively good access to information), Tulehu (semi-urban area), and Larike (rural area with limited access to services), which represent different socio-economic characteristics. A total of 78 fishers were purposively selected as respondents. Data were collected through a survey using a Likert-scale questionnaire covering perception indicators (understanding of program benefits, trust, ease of access, and effectiveness of socialization) and participation indicators (membership status, contribution payment, benefit utilization, and involvement in socialization activities). Data were analyzed using a descriptive comparative index approach to examine differences across locations. The results reveal significant differences among the study areas. Fishers in Seilale exhibit very positive perceptions (index 4.9) and very high participation, influenced by intensive socialization, strong institutional support, and contribution subsidies. In contrast, fishers in Tulehu and Larike demonstrate negative to very negative perceptions (indices 2.24 and 1.63) and very low participation, driven by limited access to information, low levels of trust, and income uncertainty. This study is limited by the use of purposive sampling, which may introduce bias, and by the descriptive nature of the analysis; therefore, generalization should be made with caution. Accordingly, strategies to enhance participation should include strengthening community-based outreach, involving local leaders as change agents, simplifying registration and contribution mechanisms through collective village services, and providing targeted initial contribution subsidies for fishers.



Copyright©2026, Wahyudi La Mani, Yoisy Lopolalan, Hellen Nanlohy.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Maluku dikenal dengan julukan sebagai provinsi seribu pulau. Julukan tersebut sangat relevan dengan jumlah pulau yang tersebar di dalamnya. Data Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Maluku tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah pulau di Provinsi Maluku sebanyak 1.340 pulau, terdiri dari 1.336 pulau kecil dan 4 pulau besar, dengan panjang garis pantai mencapai 10.630,1 km atau sekitar 13% dari total panjang garis

pantai di Indonesia (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, 2020). Kondisi geografis tersebut menjadikan Maluku sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan sektor perikanan tangkap di Indonesia.

Provinsi Maluku sebagai bagian dari industri perikanan tangkap nasional memiliki peran penting dalam mendukung ekspor hasil perikanan (Waileruny, 2021). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku tahun 2022 menunjukkan bahwa tiga kabupaten memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi perikanan tangkap, yaitu Kabupaten Maluku Tengah sebesar 30,43% (157.819 ton), Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 18,72% (97.101 ton), dan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 15,12% (78.409 ton) (BPS Provinsi Maluku, 2024).

Sebagian besar produksi perikanan tangkap tersebut dihasilkan oleh sektor perikanan skala kecil yang berperan penting dalam penyediaan pangan, pendapatan, dan mata pencaharian masyarakat pesisir (Purwanti, 2010; Sangadji, 2025). Secara global, hampir 90% dari sekitar 38 juta nelayan termasuk dalam kategori skala kecil, dengan lebih dari 100 juta orang terlibat dalam aktivitas pasca panen (Béné et al., 2007; Halim et al., 2020). Namun demikian, dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan, nelayan dihadapkan pada berbagai risiko kerja yang tinggi, seperti kecelakaan kerja, cacat permanen, kehilangan mata pencaharian, hingga risiko kematian (Abdullah, 2018).

Tingginya tingkat risiko tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan sosial yang memadai, khususnya bagi nelayan skala kecil yang sebagian besar termasuk dalam kategori pekerja bukan penerima upah (BPU). Oleh karena itu, keberadaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja nelayan. Program ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT), yang memberikan manfaat berupa santunan dan layanan kesehatan bagi peserta yang mengalami risiko kerja (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019).

Meskipun program tersebut telah tersedia, tingkat kepesertaan nelayan dalam BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam aspek persepsi dan partisipasi. Kondisi ini tidak terlepas dari perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya antar wilayah yang dapat

memengaruhi cara pandang dan keputusan nelayan dalam mengikuti program jaminan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, tiga kawasan di Pulau Ambon, yaitu Negeri Seilale, Negeri Tulehu, dan Negeri Larike, memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi akses informasi, kondisi sosial ekonomi, maupun dukungan kelembagaan. Perbedaan tersebut berimplikasi pada variasi pengalaman, tingkat pemahaman, serta partisipasi nelayan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengkaji variasi tersebut secara komparatif untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Pendekatan komparatif dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif berbasis indeks yang dihitung dari skor rata-rata jawaban responden terhadap indikator persepsi dan partisipasi menggunakan skala Likert. Nilai indeks tersebut kemudian dikategorikan ke dalam tingkat tertentu (sangat rendah hingga sangat tinggi) sehingga memungkinkan perbandingan antar wilayah secara sistematis.

Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di lapangan juga menghadapi berbagai kendala yang berbeda pada masing-masing wilayah. Pada wilayah dengan keterbatasan akses seperti Negeri Larike, kendala utama meliputi minimnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur layanan, serta rendahnya interaksi dengan institusi penyelenggara. Sementara itu, di Negeri Tulehu, kendala lebih terkait dengan rendahnya prioritas terhadap jaminan sosial akibat ketidakpastian pendapatan nelayan. Berbeda dengan itu, di Negeri Seilale, dukungan kelembagaan yang kuat dan adanya subsidi iuran menjadi faktor pendorong utama meningkatnya kepesertaan, meskipun keberlanjutan program tetap menjadi tantangan.

Persepsi dan partisipasi nelayan juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pengalaman melaut, tingkat pendapatan, serta pemahaman terhadap manfaat program. Sementara itu, faktor eksternal mencakup intensitas sosialisasi, akses informasi, dukungan kelembagaan, peran pemerintah desa, serta tingkat kepercayaan terhadap institusi penyelenggara. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal dan pola interaksi sosial dalam komunitas nelayan turut membentuk perilaku dan keputusan nelayan dalam mengikuti program jaminan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan

partisipasi nelayan pancing ulur tuna terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Pulau Ambon serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kepesertaan nelayan dalam program tersebut.

II. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari Juli sampai September 2025. Lokasi penelitian berada pada Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Dusun Air Panas Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Dusun Lay Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

2.2. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan dan wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner terstruktur. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian literatur dari berbagai sumber yang relevan, seperti laporan resmi instansi pemerintah (Badan Pusat Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan), regulasi terkait (Peraturan Pemerintah), serta publikasi ilmiah berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perikanan skala kecil dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelusuri dokumen yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi nelayan, kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, serta data statistik sektor perikanan. Untuk menjamin kualitas dan keakuratan data sekunder, dilakukan proses verifikasi melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang berbeda..

2.3. Informan Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah nelayan pancing ulur tuna sebanyak 78 orang yang tersebar di Negeri Seilale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Dusun Tanjung Air Panas Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dan Dusun Lay. Negeri Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah. Pemilihan kelompok ini didasarkan pada perannya dalam perikanan skala kecil serta tingginya risiko

kerja yang relevan dengan kajian perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mencakup satu jenis alat tangkap dan jumlah responden yang relatif terbatas, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh kategori nelayan dan memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil. Temuan penelitian ini bersifat kontekstual dan memberikan gambaran awal mengenai persepsi dan partisipasi nelayan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan sampel yang lebih luas dan beragam agar hasil lebih representatif.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pemilihan dan penentuan responden yang dalam penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, dimana teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu melalui pendekatan personal. Pertimbangan responden didasarkan pada karakteristik sampel yang akan diambil (Sugiyono, 2021). Sampling ini dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu (Umar, 2024).

2.5. Analisis Data

Untuk mengetahui sejauh mana persepsi dan partisipasi nelayan pancing ulur tuna terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, digunakan pendekatan skala Likert dengan rentang skor 1-5. Sugiyono (2021) menyatakan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial sebagai variabel penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner disusun berdasarkan indikator persepsi dan partisipasi, kemudian dilakukan uji validitas menggunakan korelasi item-total untuk memastikan setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang dimaksud. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha guna mengetahui tingkat konsistensi internal instrumen. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha > 0,70 sehingga instrumen dinyatakan reliabel.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan indeks deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata skor pada setiap indikator, kemudian dikonversi ke dalam bentuk indeks dan dikategorikan ke dalam tingkat tertentu (sangat rendah hingga sangat tinggi). Pendekatan

ini memungkinkan analisis dilakukan tidak hanya secara deskriptif, tetapi juga memberikan gambaran perbedaan antar kelompok secara lebih terukur dan ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASA

3.1. Persepsi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Instrumen untuk mengukur persepsi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas 10 pertanyaan yakni pemahaman terhadap manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) (P1), pemahaman terhadap manfaat Jaminan Kematian (JKM) (P2), pemahaman terhadap manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) (P3), pentingnya perlindungan sosial untuk nelayan dari risiko melaut (P4), keterjangkauan iuran (P5), kemudahan dalam mengakses informasi (P6), kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan (P7), kemudahan dalam

pendaftaran (P8), kemudahan untuk mengklaim (P9) dan efektifitas sosialisas terhadap seluruh nelayan (P10).

3.1.1. Persepsi Nelayan Negeri Seilale Terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Persepsi nelayan pancing ulur tuna Negeri Seilale terhadap BPJS Ketenagakerjaan berada pada kategori sangat setuju dengan rata-rata nilai indeks sebesar 4,9 atau setara dengan 98 % dari 27 responden. Sebanyak sembilan dari sepuluh indikator memperoleh nilai indeks 5 (100%), sementara satu indikator memperoleh nilai indeks 4 atau 80 % dari nilai tertinggi (Tabel 1). Hal ini menunjukkan bahwa nelayan memiliki persepsi yang sangat positif terhadap keberadaan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaminan keselamatan kerja.

Tabel 1. Persepsi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS ketenagakerjaan di Negeri Seilale

Pertanyaan (P)	S1 x f1	S2 x f2	S3 x f3	S4 x f4	S5 x f5	Jumlah (Sn x fn)	N	Nilai indeks	Arti Nilai Indeks	Rataan Nilai Indeks	Kriteria Persepsi
1	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju	4,9	Sangat Setuju
2	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju		
3	0	0	0	108	0	0	27	4	Sangat Setuju		
4	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju		
5	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju		
6	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju		
7	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju		
8	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju		
9	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju		
10	0	0	0	0	135	135	27	5	Sangat Setuju		

Sumber: Data Primer 2025

Wawancara terbuka dengan masyarakat dan penyuluh perikanan setempat, tingginya tingkat persepsi positif nelayan terhadap BPJS Ketenagakerjaan tersebut tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Negeri Seilale dalam memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan manfaat program secara kontinyu kepada seluruh masyarakat Negeri Seilale terutama yang tergolong dalam pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seperti nelayan, petani, tukang ojek, sopir angkot dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi persepsi yang cukup signifikan antar wilayah. Nelayan di Negeri Seilale memiliki persepsi yang sangat positif terhadap BPJS Ketenagakerjaan, yang tidak hanya tercermin dari nilai indeks yang tinggi, tetapi juga didukung oleh pengalaman langsung dalam menerima manfaat

program serta intensitas sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Sebaliknya, nelayan di Negeri Tulehu dan Larike cenderung memiliki persepsi negatif hingga sangat negatif.

Persepsi negatif tersebut tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Secara internal, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap manfaat program, serta pengalaman yang minim dalam berinteraksi dengan program jaminan sosial turut mempengaruhi cara pandang nelayan. Faktor eksternal seperti rendahnya intensitas sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi penyelenggara menjadi faktor dominan yang membentuk persepsi negatif tersebut. Persepsi individu terhadap suatu program sangat

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, dan kepercayaan terhadap institusi, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan sikap (Ajzen, 1991).

Di Negeri Tulehu dan Larike, sebagian besar nelayan belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung, sehingga informasi yang diperoleh cenderung terbatas dan tidak utuh. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap manfaat program, yang pada akhirnya membentuk persepsi bahwa program BPJS Ketenagakerjaan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Sebaliknya, di Negeri Seilale, intensitas sosialisasi yang tinggi serta keterlibatan aktif pemerintah desa terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nelayan terhadap program.

Persepsi nelayan terhadap BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek informasi saja, tetapi juga oleh pengalaman empiris, dukungan kelembagaan, serta konteks sosial ekonomi yang melingkupi kehidupan nelayan di masing-masing wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan persepsi

nelayan perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan karakteristik masyarakat setempat.

3.1.2. Persepsi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Tulehu

Persepsi nelayan pancing ulur tuna di Dusun Tanjung Air Panas Negeri Tulehu terhadap BPJS Ketenagakerjaan dari responden sebanyak 25 orang berada pada kategori tidak setuju (Tabel 2). Hal ini tercermin dari nilai rata-rata indeks sebesar 2,24, dengan rentang nilai indeks tiap pernyataan antara 1,81 sampai dengan 2,60. Rataan indeks tersebut setara dengan 44,8% dari skor maksimum, yang menunjukkan bahwa tingkat penerimaan nelayan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan masih relatif rendah. Seluruh butir pernyataan yang dianalisis menunjukkan kategori tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa nelayan belum memiliki persepsi yang positif terhadap aspek keberadaan, manfaat, serta mekanisme kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2. Persepsi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS ketenagakerjaan di Negeri Tulehu

Pertanyaan (P)	S1 x f1	S2 x f2	S3 x f3	S4 x f4	S5 x f5	Jumlah (Sn x fn)	N	Nilai indeks	Arti Nilai Indeks	Rataan Nilai Indeks	Kriteria Persepsi
1	16	0	0	28	15	59	25	2,36	Tidak Setuju	2,24	Tidak Setuju
2	16	0	12	12	15	55	25	2,2	Tidak Setuju		
3	16	0	18	4	15	53	25	2,12	Tidak Setuju		
4	16	0	0	4	45	65	25	2,6	Tidak Setuju		
5	16	0	0	24	20	60	25	2,4	Tidak Setuju		
6	16	0	3	20	20	59	25	2,36	Tidak Setuju		
7	16	0	0	4	36	56	25	2,24	Tidak Setuju		
8	16	0	3	8	28	55	25	2,2	Tidak Setuju		
9	16	0	18	4	15	53	25	2,12	Tidak Setuju		
10	16	10	3	16	0	45	25	1,8	Tidak Setuju		

Sumber: Data Primer 2025

Nilai indeks yang termasuk dalam kategori rendah tersebut sejalan dengan pengalaman peneliti sendiri yang bertugas sebagai penyuluh perikanan di Negeri Tulehu dimana selama ini hanya 5- 10 orang nelayan yang pernah mengikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan namun dengan volume yang relatif sangat sedikit.

Rendahnya persepsi nelayan terhadap BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Tulehu mengindikasikan bahwa stimulus berupa informasi, sosialisasi, maupun pengalaman langsung terkait program tersebut belum diterima dan diolah secara optimal. Selain itu, faktor internal seperti tingkat pengetahuan, pengalaman

sebelumnya, serta kebutuhan yang dirasakan nelayan, dan faktor eksternal seperti intensitas sosialisasi, akses informasi, serta dukungan kelembagaan, diduga turut mempengaruhi terbentuknya persepsi yang cenderung negatif.

3.1.3. Persepsi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Larike

Persepsi nelayan pancing ulur tuna di Dusun Lay, Negeri Larike dengan responden sebanyak 26 orang diperoleh rata-rata nilai indeks sebesar 1,63 atau setara dengan 32,6%, berada pada kategori sangat tidak setuju (Tabel 3). Hal ini menunjukkan

bahwa secara umum nelayan memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap keberadaan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 3. Persepsi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS ketenagakerjaan di Negeri Larike

Pertanyaan (P)	S1 x f1	S2 x f2	S3 x f3	S4 x f4	S5 x f5	Jumlah ($\sum x$ $\sum f_i$)	N	Nilai indeks s	Arti Nilai Indeks	Rataan Nilai Indeks	Kriteria Persepsi
1	19	0	15	0	5	39	26	1,5	Sangat Tidak setuju		
2	19	0	15	0	5	39	26	1,5	Sangat Tidak setuju		
3	19	0	15	0	5	39	26	1,5	Sangat Tidak setuju		
4	19	0	0	0	30	49	26	1,88	Tidak Setuju		
5	19	0	0	0	30	49	26	1,88	Tidak Setuju	1,63	Sangat Tidak Setuju
6	19	4	4	16	0	43	26	1,65	Sangat Tidak setuju		
7	19	0	3	0	25	43	26	1,65	Sangat Tidak setuju		
8	19	0	15	20	5	59	26	2,26	Sangat Tidak setuju		
9	19	0	15	0	5	39	26	1,5	Sangat Tidak setuju		
10	25	0	0	0	0	25	26	1	Sangat Tidak setuju		

Sumber: Data Primer 2025

Sebagian besar pernyataan memperoleh nilai indeks rendah, berkisar antara 1,00 hingga 2,26. Nilai indeks terendah terdapat pada pernyataan ke-10 dengan nilai 1,00, yang mengindikasikan penolakan yang sangat kuat dari responden terhadap aspek yang diukur pada indikator tersebut. Sementara itu, nilai indeks tertinggi terdapat pada pernyataan ke-8 sebesar 2,26, namun tetap berada dalam kategori sangat tidak setuju. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi tingkat penilaian antar indikator, keseluruhan persepsi responden masih cenderung negatif.

Rendahnya persepsi nelayan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dapat mengindikasikan bahwa nelayan belum memahami secara memadai manfaat, mekanisme, maupun tujuan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, persepsi negatif juga dapat dipengaruhi oleh faktor pengalaman, keterbatasan informasi. Berdasarkan wawancara terbuka dengan tokoh masyarakat, diperoleh informasi bahwa secara resmi belum pernah dilakukannya sosialisasi program oleh BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Larike sehingga hal ini menjadi penyebab utama rendahnya persepsi.

3.2. Partisipasi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Instrumen untuk mengukur partisipasi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS Ketenagakerjaan terdiri atas 5 pertanyaan yakni terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) (P1), terdaftar sebagai peserta program

Jaminan Hari Tua (JHT) (P2), rutin membayar iuran (P3), dan pemanfaatan program sesuai kebutuhan (P4) aktif mengikuti sosialisasi (P5).

3.2.1. Partisipasi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Seilale

Partisipasi nelayan pancing ulur tuna di Negeri Seilale terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan responden sebanyak 27 orang berada pada kategori sangat tinggi (Tabel 4). Hal ini ditunjukkan oleh hasil pengukuran terhadap lima butir pernyataan, dimana sebagian besar responden memberikan jawaban pada kategori skor tertinggi. Pada pernyataan 1, 3, 4, dan 5, seluruh responden menyatakan sangat setuju sehingga masing-masing memperoleh nilai indeks sebesar 5. Hal ini mengindikasikan bahwa nelayan secara aktif mendukung serta menunjukkan kesediaan yang kuat untuk terlibat dalam program BPJS Ketenagakerjaan, baik dalam bentuk kepesertaan maupun pemanfaatan manfaat yang tersedia.

Partisipasi yang tinggi atau positif tersebut adalah dampak dari peran aktif pemerintah Negeri Seilale dalam meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum dan nelayan secara khusus tentang pentingnya perlindungan sosial. Peran aktif pemerintah Negeri Seilale secara konkrit yaitu dalam bentuk memberikan subsidi iuran selama dua tahun untuk kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dan di masa keaktifan sebagai peserta

tersebut telah terjadi kecelakaan pada warga Negeri Seilale yang menyebabkan kematian.

Tabel 4. Partisipasi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS ketenagakerjaan di Negeri Seilale

Pertanyaan (P)	S1 x f1	S2 x f2	S3 x f3	S4 x f4	S5 x f5	Jumlah (Sn x fn)	N	Nilai indeks	Arti Nilai Indeks	Rataan Nilai Indeks	Kriteria Persepsi
1	0	0	0	0	27	135	27	5	Sangat Setuju	4,4	Sangat Setuju
2	0	27	0	0	0	54	27	2	Sangat Setuju		
3	0	0	0	0	27	135	27	5	Sangat Setuju		
4	0	0	0	0	27	135	27	5	Sangat Setuju		
5	0	0	0	0	27	135	27	5	Sangat setuju		

Sumber: Data Primer 2025

3.2.2. Partisipasi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Tulehu

Partisipasi nelayan pancing ulur tuna di Negeri Tulehu terhadap BPJS Ketenagakerjaan, terlihat bahwa pada pertanyaan 1, 2, 3, dan 5 seluruh responden (25 orang atau 100%) memilih kategori Skor 1 (sangat tidak setuju), sedangkan tidak terdapat responden yang memilih kategori Skor 2 sampai Skor 5 (0%), dapat dilihat pada Tabel 5. Hal ini menunjukkan bahwa secara mutlak nelayan menyatakan ketidaksetujuan terhadap aspek-aspek partisipasi yang diukur dalam keempat pernyataan

tersebut. Pada pertanyaan ke-4, sebanyak 14 responden (56%) memilih Skor 1 (sangat tidak setuju), 2 responden (8%) memilih Skor 3, 4 responden (16%) memilih Skor 4, dan 5 responden (20%) memilih Skor 5, sementara tidak ada responden yang memilih Skor 2. Meskipun terdapat variasi jawaban pada pernyataan ke-4, mayoritas responden tetap berada pada kategori sangat tidak setuju. Secara keseluruhan, nilai indeks tiap pernyataan berada pada rentang 1,00–1,64 dengan rataan nilai indeks sebesar 1,12, termasuk dalam kategori “sangat tidak setuju”.

Tabel 5. Partisipasi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS ketenagakerjaan di Negeri Tulehu

Pertanyaan (P)	S1 x f1	S2 x f2	S3 x f3	S4 x f4	S5 x f5	Jumlah (Sn x fn)	N	Nilai indeks	Arti Nilai Indeks	Rataan Nilai Indeks	Kriteria Persepsi
1	25	0	0	0	0	25	25	1	Sangat Tidak Setuju	1,12	Sangat Tidak Setuju
2	25	0	0	0	0	25	25	1	Sangat Tidak Setuju		
3	25	0	0	0	0	25	25	1	Sangat Tidak Setuju		
4	14	0	2	4	5	41	25	1,64	Sangat Tidak Setuju		
5	25	0	0	0	0	25	25	1	Sangat Tidak Setuju		

Sumber: Data Primer 2025

Rendahnya tingkat partisipasi tersebut dapat diindikasikan bahwa sebagian besar nelayan belum terlibat secara aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, baik dalam bentuk pendaftaran, pembayaran iuran, maupun pemanfaatan layanan yang disediakan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan informasi mengenai manfaat program dan rendahnya tingkat pemahaman terhadap mekanisme kepesertaan. Di sisi lain program jaminan sosial ketenagakerjaan belum menjadi kebutuhan yang menjadi prioritas utama nelayan meskipun telah beberapa kali terjadi kecelakaan perahu nelayan Negeri Tulehu hingga menyebabkan cedera dan kematian.

3.3.3. Partisipasi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Larike

Partisipasi nelayan pancing ulur tuna di Negeri Larike terhadap BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada pertanyaan 1, 2, 3, dan 5 seluruh responden (26 orang) memilih skor Skor 1 (sangat tidak setuju), sehingga nilai indeks masing-masing pertanyaan adalah 1,00 yang termasuk dalam kategori sangat tidak setuju (Tabel 6). Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas nelayan belum menunjukkan keterlibatan atau keikutsertaan yang memadai dalam aspek-aspek partisipasi yang diukur,

seperti pendaftaran, pembayaran iuran, pemanfaatan layanan, maupun keterlibatan dalam sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

Pada pertanyaan ke-4, terdapat variasi jawaban responden, yaitu sebanyak 20 orang memilih Skor 1, 16 orang memilih Skor 4, dan 5 orang memilih Skor 5, dengan nilai indeks sebesar 1,57 yang tetap berada pada kategori sangat tidak setuju. Meskipun terdapat sebagian

kecil responden yang memberikan penilaian lebih tinggi, hal tersebut belum cukup untuk menggeser kecenderungan umum bahwa tingkat partisipasi nelayan masih sangat rendah. Secara keseluruhan, rata-rata nilai indeks partisipasi sebesar 1,11, yang menempatkan partisipasi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada kategori sangat tidak setuju.

Tabel 6. Partisipasi nelayan pancing ulur tuna terhadap BPJS ketenagakerjaan di Negeri Larike

Pertanyaan (P)	S1 x f1	S2 x f2	S3 x f3	S4 x f4	S5 x f5	Jumlah (Sn x fn)	N	Nilai indeks	Arti Nilai Indeks	Rataan Nilai Indeks	Kriteria Persepsi
1	26	0	0	0	0	26	26	1	Sangat Tidak Setuju		
2	26	0	0	0	0	26	26	1	Sangat Tidak Setuju		Sangat
3	26	0	0	0	0	26	26	1	Sangat Tidak Setuju	1,11	Tidak
4	20	0	0	16	5	41	26	1,57	Sangat Tidak Setuju		Setuju
5	26	0	0	0	0	26	26	1	Sangat Tidak Setuju		

Sumber: Data Primer 2025

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa partisipasi nelayan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan di Negeri Larike masih sangat rendah, baik dari sisi kesadaran, keterlibatan, maupun tindakan nyata dalam mengikuti program. Namun yang menjadi kontradiktif dari hasil tersebut adalah 1 dari 26 responden pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika bekerja di perusahaan dan sangat memahami manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan bahkan sudah pernah mendapat manfaatnya dalam bentuk santunan uang tunai program Jaminan Hari Tua (JHT) namun tidak berdampak pada peningkatan kesadaran untuk menjadi peserta secara mandiri.

Partisipasi nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah penelitian. Perbedaan ini tidak hanya tercermin dari nilai indeks partisipasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, serta kelembagaan yang melingkupi kehidupan nelayan di masing-masing wilayah. Partisipasi individu dalam suatu program sosial sangat dipengaruhi oleh sikap, norma sosial, serta persepsi terhadap manfaat yang diperoleh (Ajzen, 1991; Rogers, 2003). Dalam konteks penelitian ini, partisipasi nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah penelitian.

Di Negeri Seilale, tingkat partisipasi nelayan tergolong sangat tinggi. Kondisi ini

tidak hanya disebabkan oleh tingginya pemahaman nelayan terhadap manfaat program, tetapi juga didukung oleh faktor eksternal yang kuat, seperti adanya subsidi iuran dari pemerintah desa, intensitas sosialisasi yang berkelanjutan, serta pengalaman empiris masyarakat dalam menerima manfaat program. Faktor sosial berupa kuatnya jaringan komunitas dan kepercayaan terhadap pemerintah desa turut mendorong terbentuknya partisipasi kolektif. Dalam konteks ekonomi, adanya subsidi iuran mampu mengurangi beban biaya bagi nelayan yang memiliki pendapatan tidak menentu, sehingga meningkatkan kemauan untuk menjadi peserta aktif.

Tingkat partisipasi nelayan di Negeri Tulehu tergolong sangat rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari aspek ekonomi, ketidakpastian pendapatan nelayan menyebabkan program jaminan sosial belum menjadi prioritas utama dalam pengeluaran rumah tangga. Secara sosial, rendahnya intensitas sosialisasi dan minimnya interaksi langsung dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan rendahnya pemahaman dan kepercayaan terhadap program. Selain itu, tidak adanya contoh nyata atau pengalaman langsung dalam menerima manfaat program di lingkungan sekitar turut memperkuat persepsi bahwa program tersebut belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi nelayan.

Di Negeri Larike, tingkat partisipasi nelayan berada pada kategori sangat rendah, meskipun terdapat satu responden yang pernah menjadi peserta dan memahami manfaat program secara langsung. Namun, pengalaman individu tersebut tidak berkembang menjadi partisipasi kolektif. Hal ini dapat dijelaskan oleh lemahnya proses difusi informasi dalam komunitas nelayan, dimana pengalaman individu tidak secara efektif ditransmisikan menjadi pengetahuan bersama. Ketiadaan sosialisasi formal dan minimnya dukungan kelembagaan menyebabkan informasi terkait manfaat program tidak tersebar secara luas. Faktor budaya dan pola interaksi sosial yang cenderung terbatas juga berkontribusi terhadap lambatnya adopsi program di tingkat komunitas. Partisipasi nelayan dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan kelembagaan, kondisi ekonomi, serta dinamika sosial dalam komunitas nelayan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi memerlukan pendekatan yang tidak hanya informatif, tetapi juga partisipatif dan berbasis pada kondisi lokal masing-masing wilayah.

3.3. Rekomendasi Peningkatan Persepsi dan Partisipasi Nelayan Pancing Ulur Tuna Terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi dan partisipasi nelayan pada tiga lokasi penelitian, maka upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan melalui strategi yang adaptif, partisipatif, dan berbasis kondisi lokal. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, membangun kepercayaan, serta memperkuat dukungan kelembagaan dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik masing-masing wilayah.

3.3.1. Penguatan Sosialisasi Berbasis Wilayah dan Komunitas

Sosialisasi perlu dilakukan secara lebih intensif dan kontekstual sesuai kondisi wilayah. Di Negeri Seilale, strategi difokuskan pada penguatan dan keberlanjutan sosialisasi melalui testimoni peserta aktif. Di Negeri Tulehu, diperlukan peningkatan frekuensi sosialisasi lapangan secara langsung (misalnya di tempat pendaratan ikan dan kelompok nelayan) minimal dua kali dalam satu bulan. Sementara di Negeri Larike, diperlukan

intervensi awal berupa program sosialisasi intensif berbasis komunitas dalam bentuk pendampingan selama periode tertentu.

Materi sosialisasi perlu disederhanakan menggunakan bahasa lokal, disertai contoh kasus nyata (klaim JKK/JKM), serta pendekatan dialogis agar lebih mudah dipahami. Pendekatan ini penting untuk mengurangi hambatan komunikasi dan meningkatkan penerimaan masyarakat (Arafah et al., 2025).

3.3.2. Pelibatan Tokoh Lokal sebagai Agen Perubahan

Pelibatan tokoh adat, ketua kelompok nelayan, penyuluh perikanan, serta nelayan yang telah menjadi peserta aktif perlu dioptimalkan sebagai agen perubahan. Mereka dapat berperan sebagai fasilitator lokal dalam menyampaikan informasi dan membangun kepercayaan masyarakat. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui pembentukan "agen sosialisasi desa" sebanyak 3-5 orang per wilayah yang diberikan pelatihan singkat terkait BPJS Ketenagakerjaan. Penggunaan testimoni peserta aktif, diskusi kelompok, serta media komunikasi lokal terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat (Mauludin, 2025).

3.3.3. Penyederhanaan Akses Layanan dan Mekanisme Pembayaran

Akses terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan perlu dipermudah melalui sistem pelayanan berbasis desa. Pemerintah desa bersama BPJS Ketenagakerjaan dapat membuka layanan pendaftaran kolektif atau sistem "jemput bola" secara berkala. Selain itu, mekanisme pembayaran iuran perlu dibuat fleksibel melalui kerja sama dengan koperasi nelayan, BUMDes, atau agen perbankan lokal. Strategi ini sangat penting terutama bagi wilayah seperti Larike dan Tulehu yang memiliki keterbatasan akses layanan. Kemudahan prosedur dan akses merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan publik (Winarno, 2012).

3.3.4. Pemberian Insentif atau Subsidi Bertahap

Pemberian stimulus awal berupa subsidi iuran terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi, sebagaimana terjadi di Negeri Seilale. Oleh karena itu, model insentif bertahap dapat diterapkan, yaitu subsidi penuh pada tahap awal, kemudian dikurangi secara bertahap hingga nelayan mampu membayar secara mandiri. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman

langsung kepada nelayan terhadap manfaat program, sehingga mendorong keberlanjutan kepesertaan.

3.3.5. Integrasi Program BPJS dengan Kebijakan Perikanan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan sektor perikanan, misalnya sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan bantuan alat tangkap, kapal, atau program pemberdayaan nelayan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan secara struktural sekaligus menjadikan perlindungan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan perikanan.

3.3.6. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Wilayah

Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, dinas perikanan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Evaluasi dilakukan minimal setiap enam bulan dengan indikator yang jelas, seperti jumlah peserta aktif, tingkat pembayaran iuran, pemanfaatan manfaat, serta tingkat pemahaman nelayan terhadap program. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian strategi secara berkelanjutan sesuai dengan dinamika kondisi lapangan di masing-masing wilayah.

IV. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi dan partisipasi nelayan pancing ulur tuna terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tiga wilayah penelitian. Nelayan di Negeri Seilale memiliki persepsi sangat positif dan tingkat partisipasi sangat tinggi yang didukung oleh intensitas

sosialisasi, pengalaman langsung terhadap manfaat program, serta adanya dukungan kelembagaan berupa subsidi iuran. Nelayan di Negeri Tulehu dan Negeri Larike menunjukkan persepsi negatif hingga sangat negatif dan tingkat partisipasi yang sangat rendah.

Rendahnya persepsi dan partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan pengetahuan, tingkat pendidikan, serta rendahnya pemahaman terhadap manfaat program. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya intensitas sosialisasi, keterbatasan akses informasi, rendahnya kepercayaan terhadap institusi penyelenggara, serta lemahnya dukungan kelembagaan di tingkat lokal. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan pada nelayan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program, tetapi sangat dipengaruhi oleh pendekatan implementasi yang kontekstual, pengalaman empiris masyarakat, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dan aktor lokal.

Beberapa saran yang dapat diajukan adalah: (1) pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan sosialisasi yang lebih intensif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas dengan pendekatan dialogis serta penyederhanaan akses layanan melalui sistem jemput bola; (2) pemerintah desa diharapkan berperan aktif melalui kebijakan lokal seperti pemberian subsidi iuran awal dan integrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan program bantuan perikanan; (3) nelayan perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi secara mandiri dengan memahami pentingnya perlindungan sosial sebagai upaya mitigasi risiko kerja.

REREFENSI

- Abdullah, J. (2018). Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9 (1), 121-135..
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Arafah, W., Tawakal, A., Mz, M. D., & Saluy, A. B. (2025). Strategi Pembangunan Ekonomi Pesisir bagi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Berseri.
- Béné, C., Macfadyen, G., & Allison, EH (2007). Meningkatkan kontribusi perikanan skala kecil terhadap pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan (Vol. 481). Food & Agriculture Org.
- BPS Provinsi Maluku (2024). Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Maluku, 2022.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku (2020). Grand Desain Lumbung Ikan Nasional Provinsi Maluku. Ambon: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, 2020.

- Fahlevvi, M.R and Z. A. Dytihana, Z.A. (2025). Pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah Pesisir Cirebon: Studi Kasus di Sektor Administrasi dan Layanan Publik," *Jurnal Media Birokrasi*, vol. 7, no. 1, pp. 35–51, 2025, doi: <https://doi.org/10.33701/jmb.v7i1.5197>.
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. R., Hordyk, A., Sondita, M. F. A., White, A. T., ... & Yuni, C. (2020). Developing A Functional Definition of Small-Scale Fisheries In Support of Marine Capture Fisheries Management In Indonesia. *JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)*, 4(2), 239-262.
- Mauludin, O. Usman, and M. A. Adha, (2025). Analisis Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Pekerja Informal Ada Salah Satu Cabang Lembaga Sosial Di Jakarta," *MUSYTARI : Jurnal Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, vol. 22, no. 4, 2025, doi: 10.8734/mnmae.v1i2.359.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 2019.
- Purwanti P. (2010). Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil, Pertama. Malang: UB Press, 2010.
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion of innovations. In *An integrated approach to communication theory and research* (pp. 432-448). Routledge.
- Sangadji, M., Pattimahu, T. V., & Haruna & Tawari, R. H. S. (2025). Household Income Diversification Strategy for Tuna Fishermen in Tehoru District, Central Maluku Regency, Indonesia. *Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries*, 29(2), 2931-2944.
- Sugiyono (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 3. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Umar, H. (2004). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*.
- Waileruny, W (2021). *Alternatif Pengembangan Perikanan Skala Kecil Dalam Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional*. Penerbit dan Balai Pustaka, Jakarta, 2021.
- Winarno, B (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Edisi dan. Center For Academic Publishing Service, 2012.